



Perbandingan *Beksan Lawung Ageng* dalam Pernikahan Agung Tahun 2013 dengan Peringatan 30 Tahun Bertahta Sri Sultan Hamengku Buwono X Tahun 2019 di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat : Kajian Aspek Makna, Bentuk, dan Fungsi

Riki Kristianto, Kuswarsantyo✉

Jurusan Pendidikan Seni Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima :

01 Mei 2020

Disetujui :

01 Juni 2020

Dipublikasikan :

05 Juli 2020

Keywords:

Lawung Ageng dance, Yogyakarta classical dance, Yogyakarta palace, royal wedding, accession to the throne

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membandingkan persamaan dan perbedaan *Beksan Lawung Ageng* pada pernikahan antara GKR Hayu dengan KPH Notonegoro tahun 2013 dengan yang ditampilkan pada peringatan 30 tahun bertahta Sultan Hamengku Buwono X tahun 2019. Metode penelitian kualitatif dan Etnokoreologi digunakan dalam penelitian ini dengan deskripsi analisis selain menggunakan *hermeneutika* yang merupakan teori tentang interpretasi juga menggunakan pendekatan etnokoreologi, sejarah, sosiologi, antropologi dan semiotika. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Uji keabsahan data dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dan perbedaan fungsi serta bentuk *Beksan Lawung Ageng* pada pernikahan GKR Hayu dengan KPH Notonegoro pada tahun 2013 dengan peringatan 30 tahun bertahta Sultan Hamengku Buwono X. Selain itu diketahui faktor-faktor dan alasan-alasan atas perubahan fungsi dan perbedaan bentuk *Beksan Lawung Ageng* pada pernikahan GKR Hayu dengan KPH Notonegoro pada tahun 2013 dan *Beksan Lawung Ageng* pada peringatan 30 tahun bertahta Sultan Hamengku Buwono X yang mengungkapkan kebijakan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat di era Sultan Hamengku Buwono X dalam perlindungan dan pengembangan pusaka tari.

Abstract

This study aims to compare the similarities and differences of Beksan Lawung Ageng in marriage between GKR Hayu and KPH Notonegoro in 2013 with those displayed on the 30th anniversary of Sultan Hamengku Buwono X's year 2019. Qualitative research methods and ethnocoreology were used in this study with analytical descriptions other than using hermeneutics which is a theory of interpretation also uses ethnochoreology, history, sociology, anthropology and semiotics approaches. Data collection techniques using observation, interviews, and study documentation. Data analysis is performed through data reduction, data presentation, and conclusions. Test the validity of the data by triangulation. The results of this study indicate that there are changes and differences in the function and form of the Beksan Lawung Ageng at GKR Hayu's marriage to KPH Notonegoro in 2013 with the 30th anniversary of Sultan Hamengku Buwono X's throne. Besides, there are also factors and reasons for changes in function and differences. the form of Beksan Lawung Ageng at the wedding of GKR Hayu with KPH Notonegoro in 2013 and Beksan Lawung Ageng at the 30th anniversary of Sultan Hamengku Buwono X's reign which revealed the Ngayogyakarta Hadiningrat Karaton policy in the era of Sultan Hamengku Buwono X in the protection and development of dance heirlooms.

✉ Alamat korespondensi:

Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email : kuswarsantyo@uny.ac.id

PENDAHULUAN

Beksan Lawung berdasar wawancara R.B. Soedarsono dengan narasumber Rio Yosodipuro pada tanggal 28 November 1983, menyatakan bahwa Beksan Lawung telah ada sejak jaman Kerajaan Jenggala, dengan adanya Beksan Lawung dan Dhadhap yang digunakan untuk menarik dan menambah semangat prajurit dalam berolah senjata. Kemudian Beksan Lawung berkembang terus hingga jaman kerajaan Mataram, yang perkembangannya menjadi Beksan Lawung gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta (Soedarsono, 1984).

Beksan Lawung Ageng gaya Yogyakarta adalah bagian dari Beksan Trunajaya, yang secara lengkap dibagi menjadi tiga bagian yaitu Beksan Lawung Alit (alus), Beksan Lawung Ageng (gagah), dan Beksan Sekar Madura (alus dan gagah). Tarian ini mendapat inspirasi dari keadaan sosial politik saat itu, di mana Sultan Hamengku Buwono (HB) I (1755 – 1792) yang sangat mengagumi keberanian Pangeran Trunajaya dari Madura dalam perang melawan VOC, sehingga Sultan HB I memasukan unsur Madura dalam pocapan Beksan Lawung Ageng (Suryobrongto, 1981).

Beksan Lawung Ageng merupakan tarian prajurit yang berlatih perang dengan menggunakan senjata lawung untuk menunjukkan semangat, keberanian dan kepahlawanan para prajurit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang ditampilkan melalui gerak yang bertema kepahlawanan (warisanbudaya.kemdikbud.go.id., 2010).

Dalam perkembangannya, Beksan Lawung Ageng termasuk sebagai tari upacara sehingga selain ditampilkan dalam pernikahan putra-putri raja juga dipentaskan dalam menyambut tamu agung atau upacara kenegaraan/kerajaan lainnya (Soedarsono, 1984) sehingga Beksan Lawung Ageng memiliki kedudukan yang sangat tinggi (Soedarsono, 1990).

Pertunjukan Beksan Trunajaya secara lengkap terakhir kali dipentaskan dalam pernikahan putra raja pada tahun 1917, di era Sultan HB VII (1877-1920) dalam merayakan pesta pernikahan KPH Brongtodiningrat (Soedarsono, 1984). Sejak itu Beksan Trunajaya tidak lagi ditampilkan secara lengkap, bahkan Beksan Lawung Ageng telah dipadatkan dan dipersingkat.

Pada era Sultan HB X sekarang ini, Beksan Lawung Ageng juga ditampilkan dalam

pernikahan putri-putri Sultan serta dalam menyambut tamu Sultan. Selain itu juga ditampilkan pada perkawinan masyarakat umum karena Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat memperbolehkan Beksan Lawung Ageng ditampilkan di luar karena Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Kuswarsantyo, 2019).

METODE

Menurut Slamet (2018) bahwa tari merupakan fenomena sosial yang mengalami proses dalam mencapai kemapanan. Permasalahan-permasalahan dalam tari selalu terkait dengan fenomena sosial lainnya yang dalam melakukan analisis dapat menggunakan perbandingan komparatif atau grafis, sehingga dalam meneliti tari sebagai suatu ilmu tidak berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yaitu penelitian kualitatif.

Dengan metode deskripsi analisis menurut Sedyawati (2004) akan didapatkan gambaran terhadap subyek dan objek penelitian berdasar fakta yang merupakan representasi obyektif dari gejala-gejala yang terdapat pada setting penelitian. Dilakukannya analisis untuk memunculkan makna sosial budaya dalam sebuah peristiwa guna memberikan pandangan yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang dibahas. Selain itu digunakan hermeneutika yang menurut Siswanto (2017) bahwa hermeneutika pada dasarnya adalah sama dengan teori tentang interpretasi di mana bahasa dikenal strukturnya lewat tata bahasa atau gramatik, namun menganalisis tata bahasa belum cukup untuk dapat menganalisis teks sehingga diperlukan suatu prinsip untuk memahami. Pendekatan etnokoreologi yang menurut Ahimsa-Putra (2007:93) menempatkan tari sebagai objek multidimensional, di mana etnokoreologi masih sekerabat dengan etnosains dan etnoart yang merupakan pendekatan yang muncul dalam antropologi budaya.

Telaah seni pertunjukan di Indonesia pada saat ini sering menggunakan perspektif kajian pertunjukkan dengan menggunakan semiotika dan antropologi sebagai alat analisisnya yang dikombinasikan dengan estetika koreologi dan lainnya (Pramayoza, 2013). Pendapat Soedarsono dengan merujuk pada pendapat De Marinis (dalam Sumaryono, 2017:63) bahwa seni pertunjukan, termasuk di dalamnya seni tari hakikatnya bersifat entitas

multilapis yang memiliki dua perspektif yaitu teks dan konteks di mana teks adalah kajian-kajian tentang peristiwa seni pertunjukannya, dan konteks adalah kaitannya dengan sosial kehidupan, sejarah dan latar belakang kebudayaan yang melingkupi tari tersebut di dalam kelompok suku yang dimaksud (Ayuningtyas, 2018: 139). Sehingga penelitian-penelitian tentang seni pertunjukan, termasuk seni tari, disebut multi-disiplin karena analisis-analisis yang berupa teks dan konteks membuat penelitian menjadi utuh dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sebagai ilmu bantu (Sumaryono, 2017).

Pendapat Wuthnow (dalam Pramayoza, 2013:xii-xiii) empat pendekatan yang dapat digunakan dalam kajian pertunjukan yaitu: 1) Pendekatan struktural yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian atas pola dan aturan yang mengikat kebudayaan sebagai kesatuan (Sutiyono, 2013: 48); 2) Pendekatan dramaturgi yang berfokus pada aspek ekspresi dan komunikasi suatu kebudayaan melalui bentuk ucapan, tindakan benda dan peristiwa, di mana ritual dan tindakan simbolik lainnya pada dasarnya merupakan dramatisasi kualitas hubungan sosial; 3) Pendekatan institusional menekankan pentingnya peran organisasi yang mengkonstitusi kesenian, di mana sumber daya dan distribusinya kepada seluruh anggota budaya menghadirkan relasi kuasa antara kesenian, negara, pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan media masa sebagai agen yang menguasai dan mendistribusikan berbagai sumber daya kebudayaan; 4) Pendekatan dialektis yaitu pendekatan dengan menggunakan perkembangan masyarakat dan pemikirannya.

Penelitian-penelitian tentang tari merupakan sebuah penelitian multi-disiplin karena analisis-analisis yang berupa teks dan konteks membuat penelitian menjadi utuh dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sebagai ilmu bantu, diantaranya : 1) Sejarah, menurut Sedyawati (1980:30) bahwa Sejarah tari adalah bentuk dan fungsi-fungsi tari; 2) Ilmu antropologi yang mempelajari budaya dan masyarakat pendukung tari, dalam penelitian ini Karaton Ngayogyakarta, serta melihat fungsi Beksan Lawung Ageng sebagai tarian ritual dan sakral di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat serta pandangan masyarakat Jawa tentang Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya Jawa; 3) Etnokoreologi yaitu Ilmu

tentang tari-tari etnis yang menyertakan juga keterlibatan masyarakat pendukungnya, karena tari adalah produk sebuah masyarakat yang mengandung nilai-nilai yang dianut masyarakat tersebut; 4) Perbandingan seni dengan menekankan pentingnya keterkaitan antar karya seni baik secara historis teoritis dan studi kritik; 5) Semiotika dengan mengungkap simbol-simbol dalam yang ada dalam Beksan Lawung Ageng; 6) Sosiologi dengan mempelajari masyarakat dalam penelitian ini khususnya digunakan dalam melihat status sosial khususnya cara pandang kaum ningrat terhadap tarian istana atau tari klasik khususnya Beksan Lawung Ageng yang tentunya akan berbeda dengan masyarakat kebanyakan atau masyarakat umum; 7) Cabang ilmu filsafat yaitu Hermeneutika digunakan untuk mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang. Teori Hermeneutika yang akan digunakan adalah Hermeneutika Fenomenologi Paul Ricoeur (1913-2005) dan Hermeneutika Teologis Rudolf Karl Bultmann (1884-1976).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Simbolis dan Mitos dalam Beksan Lawung Ageng pada Pernikahan Agung Tahun 2013 di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Schleiermacher dengan hermeneutika universal tidak membatasi diri hanya pada teks-teks khusus dan "Penafsir" atau peneliti harus memposisikan diri baik secara subjektif maupun objektif ke dalam posisi pencipta (Hardiman, 2015). Menurut Schleiermacher bahwa penafsir harus memiliki kemampuan memahami sebuah teks yang dikenal dengan lingkaran hermeneutika, di mana menafsirkan teks atau dalam hal ini sebuah tarian yang bernama Beksan Lawung Ageng merupakan tugas reproduktif, yakni menghadirkan kembali seluruh perasaan, pikiran, kehendak pencipta seperti kehendak Sultan HB I.

Dengan bertolak dari gagasan Schleiermacher, Dilthey berpendapat bahwa untuk memahami suatu teks, kita harus menemukannya di dalam konteks kehidupan penulisnya, dan konteks kehidupan terdiri atas masyarakat, kebudayaan dan sejarah (Hardiman, 2015).

Pendapat Schleiermacher dan Dilthey dilanjutkan oleh Ricoeur. Pendapat Ricoeur

menyatakan bahwa simbol-simbol tidak hanya untuk interpretasi, tetapi juga untuk refleksi filosofis dan membiarkan mitos-mitos itu berbicara kepada kita untuk masa kini yang dalam konteks kekinian (Hardiman, 2015). Sehingga ada hubungan yang kuat antara hermeneutika Schleimacher dengan hermeneutika Ricoeur.

Pernikahan akan merubah peran dari kedua mempelai yang harus melepaskan keterikatan dan kebiasaan lamanya serta membentuk yang baru, dari dua manusia lajang menjadi suami istri, dari peran seorang anak yang setelah menikah akan menjadi orang tua dan lainnya. Perubahan peran ini dianggap penting dalam masyarakat Jawa sehingga memerlukan ritual supaya mencapai keberhasilan. Oleh karena itu dalam perkawinan putra-putri Sultan Yogyakarta dilakukan dengan tata cara dan syarat-syaratnya serta ditampilkan Beksan Lawung Ageng sebagai tarian sakral untuk keperluan ritual tersebut.

Perkawinan dikondisikan sebagai daur ulang manusia yang diritaskan seperti pernyataan Kraemer (dalam Djoharnurani, 1991:94) bahwa perkawinan adalah hubungan kawula dan gusti, maka perkawinan termasuk sebuah proses ekstasis dalam monisme yang radikal. Selanjutnya pendapat Zoetmulder (dalam Djoharnurani, 1991:94) bahwa pembagian Ada atau ruh suci yang diaminasikan menurut dua lingkungan yang ditampilkan sebagai hakikat pria dan wanita mengingatkan pada tantrisme.

Beksan Lawung Ageng berfungsi sebagai wakil Sultan pada pernikahan putra-putri raja, sehingga Beksan Lawung Ageng memiliki nilai dan kedudukan yang tinggi serta memiliki kekuatan yang dapat menyempurnakan kelangsungan upacara ritual, sehingga bersifat wajib ada dalam setiap pernikahan putra-putri Sultan (Djoharnurani, 1991). Seluruh elemen dari Beksan Lawung Ageng baik secara mikro maupun makro memiliki makna ritual serta fungsi yang penting dalam menciptakan makna yang total (Djoharnurani, 1991).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, bahwa perkawinan putra-putri sultan dimaknakan sebagai ritual untuk menyatukan dengan Tuhan, telah manunggal dengan Zat yang Ada, Zat Ketuhanan. Sehingga upacara perkawinan putra-putri Sultan (*Dhaup*) adalah merupakan pernyataan hubungan ritus, luluhnya dua kekuatan menjadi satu kekuatan

yang mutlak, satu kedwitunggalan dalam pengertian yang paling dalam. Sehingga Beksan Lawung Ageng yang merupakan bagian dari upacara *dhaup* juga memiliki makna yang sama (Djoharnurani, 1991).

Secara filosofis Beksan Lawung Ageng menuntun manusia pada cara-cara yang benar dalam ulah kridhaning asmara atau teknik berolah asmara yang menandai dan memaknai upacara ritual kejawen tantris seperti pendapat Zoetmulder, serta pandangan manunggaling kawula-Gusti seperti pendapat Kraemer (Djoharnurani, 1991).

Ywanjono (dalam Pramutomo 2009:73) menyatakan bahwa beliau selalu ingat kata-kata ayahnya, G.P.B.H. Suryobrongto, yang menyatakan bahwa ragam gerak *sodhoran silih unghih* sebenarnya menunjukkan karakter *Jajar* dalam Beksan Lawung seperti ayam jago yang hendak diadu sehingga bulu-bulu pada lehernya serta kedua kaki ayam itu selalu bergejolak. Sehingga menurut Pramutomo (2009) bahwa Beksan Lawung Ageng berhubungan dengan kontekstualitas sistem simbol dan hubungan seks menurut konteks upacara perkawinan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Peran *Jajar* divisualisasikan sifat hubungan seks yang merupakan refleksi dari sepasang pengantin yang baru pertama kali berhubungan seks (Widaryanto & Sumardjo (Ed.), 2012). Sedangkan penari *Lurah* divisualisasikan sebagai cara-cara tingkat lanjut menikmati hubungan seks, serta gerak ragam kagak impur dari peran *Lurah* adalah sebuah ungkapan tingkat lanjut yang lebih tenang serta mengingatkan terhadap laku hubungan sakral antara suami istri yang semestinya didahului dengan suatu bentuk pemanasan yang cukup lama serta kemudian berakhir dengan klimaks yang teramat pendek disimbolkan melalui gerakan perang dengan sodok menyodok yang merupakan klimaks yang sangat pendek dibanding persiapan perang yang panjang (Widaryanto & Sumardjo (Ed.), 2012).

Fungsi Beksan Lawung Ageng sebagai kawruh urip yang harus dicerna oleh sepasang pengantin yang disampaikan melalui lagon diawal pertunjukan yang merupakan petuah Sultan tentang sebuah perkawinan, yang kemudian diakhiri dengan simbol kesuburan yang dalam Beksan Lawung Ageng disimbolkan dengan properti lawung dan perempuan disimbolkan dengan tanah sebagai "Ibu Bumi" (Paluseri, et al, 2017) atau sering juga disebut Ibu Pertiwi sebagai lambang

keperempuan (warisanbudaya.kemdikbud.go.id, 2010) atau mitologi Dewi Sri sebagai dewa kesuburan (Endraswara, 2015). Sehingga arah lawung dalam sodoran yang melambangkan hubungan seksual, posisi *lawung* adalah ke bawah menusuk bumi (Sugiharti, 2019).

Perbandingan Bentuk Penyajian Beksan Lawung Ageng dalam Pernikahan Agung Tahun 2013 dengan Peringatan 30 Tahun Bertahta Sultan HB X Tahun 2019 di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Persamaan

Dalam Beksan Lawung Ageng yang ditampilkan pada pernikahan agung tahun 2013 dan yang ditampilkan dalam rangka peringatan 30 tahun bertahta Sultan HB X pada saat penari melakukan motif gerak yang menimbulkan desain garis, dengan kesan yang ditimbulkan adalah tegas, manis, dinamis bahkan lembut.

Beksan Lawung Ageng yang termasuk dalam tari gagah gaya Yogyakarta maka gerakannya memiliki volume yang luas, sehingga motif gerakannya menunjukkan volume yang lebar dan garis lurus yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa Beksan Lawung Ageng memiliki karakter keras dan tegas terlihat dari gerakan dan pola lantai yang semuanya menggunakan pola garis yang lurus (horizontal) yang memunculkan kesan gagah dan tegas pada gerakan-gerakan tersebut. Beksan Lawung Ageng pada pernikahan agung tahun 2013 dan peringatan 30 tahun bertahta Sultan HB X sama-sama menggunakan gerak lurus dan menggunakan volume yang lebar sehingga membentuk ruang gerak yang luas.

Sebagian besar penyajian Beksan Lawung Ageng menggunakan level medium karena tarian ini merupakan hasil inspirasi perlombaan watangan. Penggunaan level rendah yang digunakan dalam motif gerak Beksan Lawung Ageng terdapat pada awal dan akhir penyajian pada gerak sembah dan gerakan jengkengan mengambil lawung pada awal penyajian.

Komposisi Beksan Lawung Ageng dibagi-bagi untuk memudahkan dalam menganalisis, dan secara keseluruhan dibagi menjadi lima bagian yaitu Ajon-ajon, jogedan, sodoran atau sodoran, dan mundur beksa. Tidak ada perbedaan urutan gerak Beksan Lawung Ageng dalam pernikahan GKR Hayu tahun 2013 dengan pertunjukan Beksan Lawung Ageng

dalam peringatan 30 Tahun bertahta Sultan HB X Tahun 2019.

Tiga gendhing inti sebagai iringan Beksan Lawung Ageng adalah Gendhing Gangsaran, Gendhing Roning Tawang, Gendhing Rog-rog Asem. Dalam Beksan Lawung Ageng terdapat dua kali adegan/gerakan sodoran, yang pertama dilakukan oleh penari Jajar dan yang kedua oleh penari Lurah, dan keduanya diiringi dengan gendhing Gangsaran. Sesuai urutan gendhing Beksan Lawung Ageng untuk mengiringi penari *Jajar* yaitu *Gangsaran*, *Roning Tawang*, pada *sodoran* diiringi dengan *Gendhing Gangsaran* lalu setelah *sodoran* kembali ke *Gendhing Roning Tawang*. Empat penari *Lurah* masuk ke atas pentas dengan diiringi *Gendhing Bima Kurda*. Beberapa gerakan tari sebelum *sodoran* diiringi *Gendhing Rog-rog Asem*. Selanjutnya pada gerakan *sodoran* diiringi *Gendhing Gangsaran*. Setelah *sodoran Gendhing Bima Kurda* mengiringi penari *Lawung Lurah*, dan diakhiri dengan *Gendhing Gangsaran*.

Tata busana dan tata rias tari gaya Yogyakarta yang digunakan sekarang adalah karya Sultan HB VIII (1921 - 1939) yang memiliki banyak perbedaan dengan jaman sebelumnya, hanya kostum bedhaya yang tidak banyak mengalami perubahan pada tata busana dan tata riasnya (Kawendrasusanta, 1981).

Pada era Sultan HB VII kostum penari sangat sederhana sehingga penari dituntut lebih berat dalam penjiwaan, karena tanpa pakaian sebagai identitas khusus, para penari harus mampu menampilkan tokoh yang dibawakan dengan sempurna supaya penonton mengerti dan dapat membedakan antara masing-masing tokoh (Suharto, 1981). Menurut Suharti (2002) dalam Beksan Lawung Ageng terdapat peran yang berbeda-beda sehingga kostum juga berbeda untuk setiap peran kelompoknya.

Djoharnurani (1980) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa bahasa dalam pocapan mayoritas menggunakan Bahasa Madura, dan hanya sedikit sekali menggunakan bahasa Bugis. Menurutnya dari keseluruhan rangkaian pocapan yang tertulis, secara implisit menggambarkan ada suatu pertunjukan pada suatu pesta, tetapi jika dilihat secara harafiah tidak menunjukkan adanya percakapan yang menggambarkan suatu kejadian yang bermakna ritual. Makna pocapan belum dapat dipahami sebagai makna ritual kecuali dikaitkan dengan unsur-unsur lain dalam Beksan Lawung Ageng dan didudukkan dalam konteks keseluruhan yang bermakna ritual, seperti gerak tari dan

kandha serta lagon atau ada-ada. Pocapan dalam kedua Beksan Lawung Ageng yang dipentaskan pada pernikahan antara GKR Hayu denga KPH Notonegoro pada tahun 2013 dan Peringatan 30 tahun masehi bertahtanya Sultan HB X tidak terdapat perbedaan.

Perbedaan

Pada penyajiannya Beksan Lawung Ageng pada pernikahan agung tahun 2013 menggunakan sistem “*pendhapan*” di mana penari Beksan Lawung Ageng masuk dari arah kanan dan kiri pendhapa. Penari menghadap ke utara menghadap kepada mempelai yang didampingi orang tua pengantin, termasuk Sultan HB X. Pendhapa sebagai suatu panggung pertunjukan tari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selalu dikaitkan dengan upacara sakral dan mempunyai makna tertentu sehingga latar belakang keterkaitan antara pertunjukan dan upacara tersebut yang bermuara pada konsep *ratu gung binathara* yang menghubungkan semua aspek kehidupan untuk menopang keberlangsungan kekuasaan raja (Martiar, 2003). Konsep pendhapa adalah menghubungkan aspek kehidupan untuk menopang keberlangsungan kekuasaan raja, sehingga makna simbolis pergelaran di pendhapa dapat dicermati dari aturan-aturan tertentu yang mengikat, baik itu sebelum, sewaktu dan sesudah pergelaran berlangsung (Martiar, 2003).

Dalam peringatan 30 tahun bertahta Sultan HB X, meskipun ditampilkan di dalam Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, penyajian tari di ruangan terbuka antara *Sitihinggil* dan gedung Pagelaran. Semua penonton termasuk Sultan HB X menyaksikan penyajian dari bangsal Pagelaran yang berada di sisi utara *Sitihinggil*, sehingga penari menghadap ke utara. Penari memasuki ruang tari dari arah *Sitihinggil* menuruni tangga *Sitihinggil*, dan mundur juga melalui pintu dan tangga yang sama. Penyajian tari seperti pada bentuk prosenium, yang menurut Martiar (2003) bahwa pertunjukan yang ditonton dari satu arah menjadikan suatu pertunjukan bagaikan lukisan dengan fokus pandangan terpusat pada satu arah, yang menyebabkan pertunjukan itu menjadi indah dan penuh pemandangan. Bentuk panggung prosenium menciptakan jarak sehingga penonton harus memusatkan pikiran dan berkonsentrasi penuh supaya dapat menangkap seluruh koreografi beserta aspek pendukung yang digunakan

untuk memperindah pertunjukan seperti tata pentas, tata lampu dan properti menjadi satu kesatuan yang utuh dari konsep pertunjukan. Pada panggung prosenium sengaja diciptakan jarak antara pertunjukan dan penonton, dan panggung berbentuk bingkai bagi pertunjukan dan penonton untuk berkomunikasi dalam menikmati penampilan dengan suasana formal dan tercipta ketenangan.

Beksan Lawung Ageng yang ditampilkan dalam peringatan 30 tahun bertahta Sultan HB X terdapat perbedaan yang dapat dilihat dengan jelas dari jumlah penarinya. Akan tetapi menurut Kuswarsantyo (2020) secara struktural tidak ada perbedaan. Yang berbeda dari kedua Beksan Lawung Ageng yang ditampilkan adalah jumlah penari *Jajar* dan *Pengampil* atau *Ploncon* saja, yaitu dari masing-masing peran yang biasanya 4 orang penari menjadi masing-masing berjumlah 16 penari, sehingga jumlah penari *Jajar* dan *Pengampil* atau *Ploncon* menjadi 32 orang penari. Sedangkan Botoh dan Salaotho masing-masing 2 penari, serta Lurah 4 orang, sehingga total penari adalah 40 orang (Kuswarsantyo, 2020). Perubahan ini karena adanya interpretasi dan penafsiran dari pemilik ide dan/atau koreografer atau penata tari. Meskipun begitu secara umum tidak ada yang berubah dari koreografi untuk Botoh dan Lurah, namun untuk *Jajar* berubah karena menyesuaikan jumlah penari.

Tata lampu dan tata cahaya memegang peranan penting supaya penari terlihat tiga dimensi. Tata cahaya pada tari Beksan Lawung Ageng yang digunakan dalam pernikahan agung tahun 2013 adalah *general lighting*, karena dilakukan di pendhapa Kepatihan. Hal ini sesuai dengan konsep ruang tari yang berbentuk pendhapa serta acara perkawinan yang agung dan sakral. Sedangkan dalam peringatan 30 tahun bertahta Sultan HB X penampilan Beksan Lawung Ageng menggunakan tata lampu kontemporer, meski Beksan Lawung Ageng yang ditampilkan adalah dalam bentuk pengembangan dan lokasi serta *background* bangunan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki bentuk klasik.

Demitologisasi Beksan Lawung Ageng pada Peringatan 30 tahun Bertahta Sultan HB X Tahun 2019

Beksan Lawung Ageng yang ditampilkan dalam peringatan 30 tahun bertahta Sultan HB

X telah mengalami perubahan yang dapat dilihat dengan jelas dari jumlah penarinya. Perubahan ini karena adanya interpretasi dan penafsiran dari pemilik ide dan/atau koreografer atau penata tari.

Martin Heidegger (1899-1976) dengan teori hermeneutika faksisitas menyatakan bahwa teks tidak dapat direproduksi dan makna menyingkapkan diri kepada pembaca karena memahami bukan proses kognitif belaka melainkan dengan kondisi eksistensial (Hardiman, 2015). Konsep Heidegger tentang pra-struktur digunakan oleh Rudolf Karl Bultmann (1884-1976) dalam menerapkan dalam penjelasan atau penafsiran teks alkitab dengan mencoba memahami alkitab bukan dari makna historisnya melainkan dari makna eksistensialnya (Hardiman, 2015). Dengan demitologisasi, Bultmann memahami makna eksistensial mitos, dan berupaya untuk menjembatani kesenjangan antara bahasa mistis teks sakral dan pemahaman rasional pembaca modern sehingga demitologisasi dapat memperkaya penjelasan atau penafsiran teks (Hardiman, 2015).

Pandangan Bultmann tentang demitologisasi bahwa pusat dari konsep demitologisasi adalah pandangan orang pada abad pertama yang bercirikan mitos dan orang modern tidak dapat menerima kerangka yang bersifat mitos, serta mitos merupakan cerita yang tidak membedakan fakta dari yang bukan fakta yang di dalam isinya berasal dari suatu jaman pra-ilmiah (Ariyanto, 2008).

Mitos adalah suatu cerita kuno yang di dalamnya mengandung pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban tentang hal-hal pokok dalam hidup dan mati, tentang Tuhan dan manusia dan lain-lain yang dipikirkan dan diteruskan dalam bentuk cerita sehingga demitologisasi memiliki arti bahwa mitologi atau kumpulan mitos-mitos yang perlu dihilangkan (Ariyanto, 2008).

Tujuan dari mitos adalah untuk menyatakan pengertian manusia tentang dirinya sendiri, bukan untuk menyajikan gambaran objektif tentang dunia. Mitos menggunakan perumpamaan dan istilah-istilah untuk menyatakan keyakinan-keyakinan tentang pengertian manusia mengenai dirinya sendiri. Sehingga demitologisasi berarti penafsiran secara eksistensial menurut pengertian manusia terhadap keberadaannya sendiri dengan istilah-istilah yang dapat

dipahami oleh orang modern itu sendiri (Ariyanto, 2008).

Soedjono (1997) menyatakan bahwa suatu perubahan akan terjadi terhadap sesuatu hidup, dan akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah keberadaannya. Demikian pula dengan kebudayaan yang mengalami perubahan sesuai dengan tantangan dan tuntutan jaman baik berupa keadaan lingkungan alam maupun kemasyarakatan, karena berjalannya waktu telah menunjukkan adanya indikasi yang membutuhkan penyesuaian atau adaptasi baru. Sangat besar kemungkinan tradisi peninggalan leluhur berubah sesuai perkembangan jaman yang juga telah memberikan nuansa pada budaya tradisi tersebut. Shils (dalam Soedjono, 1997:322-324) menyatakan bahwa budaya tradisi tidak akan berubah dengan sendirinya karena dalam diri budaya itu terdapat berbagai potensi yang dapat diubah oleh manusia, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan budayanya.

Dalam hal Beksan Lawung Ageng, pada saat ini telah mengalami perubahan baik dalam fungsi dan bentuknya. Perubahan-perubahan tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor baik dari dalam dan juga faktor di luar Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Perubahan Beksan Lawung Ageng yang sangat signifikan karena faktor dari dalam adalah:

1. Pada tahun 1950an ketika Sultan HB IX membuat kebijakan bahwa semua tarian Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tadinya bersifat ritual menjadi tarian hiburan, sehingga Bedhaya Sanga, Srimpi dan Beksan Lawung Ageng yang tadinya tidak boleh dibawakan di luar Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat diajarkan di luar Karaton (Soerjobrongto, 1981)

2. Beksan Trunojoyo yang terdiri dari Beksan Lawung Ageng, Beksan Lawung Alit serta Beksan Sekar Medura adalah pusaka Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan tari upacara berfungsi sebagai wakil pribadi Sultan pada perkawinan agung di Kepatihan. Selain itu Beksan Lawung juga dipentaskan untuk menyambut tamu atau upacara kenegaraan Kasultanan Yogyakarta. Pertunjukan Beksan Trunajaya yang lengkap dengan hanya berlangsung sampai tahun 1917.

3. Sultan HB X hadir dalam resepsi pernikahan putri-putrinya di mana pada jaman dahulu seorang raja yang sedang bertahta tidak diperbolehkan menghadiri resepsi pernikahan

putra atau putrinya, dan kehadiran raja diwakili oleh Beksan Lawung Ageng.

4. Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat membuka diri kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat luas sekarang dapat melihat kegiatan Karaton dengan memaksimalkan penggunaan teknologi.

Sedangkan faktor perubahan dari luar adalah berubahnya kedudukan dan fungsi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang kemudian turut andil dalam merubah Beksan Lawung Ageng dari tarian ritual menjadi tarian sekuler yang hanya bersifat hiburan atau sekuler atau profan yaitu:

1. Perubahan politik pada tanggal 5 September 1945 ketika Sultan HB IX menyatakan bahwa Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia, melakukan reorganisasi pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dengan menggeser dan tidak mengganti kedudukan *Pepatih Dalem* (Dwiyanto, Ronald, Suwito, Suharti, & Purwodiningrat, 2010).

2. Perubahan demografi di mana masyarakat Yogya sudah tidak lagi homogeny (Dwiyanto, Ronald, Suwito, Suharti, & Purwodiningrat, 2010). Dalam abad ke-21 ini Yogyakarta menghadapi tantangan dalam masalah demografi yaitu angka penduduk usia muda Yogyakarta yang besar (Giyarto, 2019). Hal ini juga mempengaruhi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperkenalkan seni pertunjukan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap generasi muda melalui aktif di media sosial.

3. Faktor ekonomi ikut merubah kebudayaan yang ada di Yogyakarta, bahwa kondisi ketimpangan ekonomi di Yogyakarta sangat ironis karena karena pola pembangunan ekonomi yang lebih banyak mengandalkan mekanisme pasar yaitu berlakunya mekanisme berupa penumpukan modal (Hardiyanto, 2018). Ketimpangan ekonomi sangat berpengaruh pada minat masyarakat untuk mengenal kebudayaannya karena masyarakat lebih berkonsentrasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan dan pakaian sehingga tidak memikirkan untuk mengenal budayanya.

4. Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata utama Indonesia, dan seni tari memiliki keterkaitan dengan industri wisata di Indonesia, menyebabkan terjadinya suatu usaha penyesuaian sehingga tarian istanapun mengikuti orientasi pasar, dikemas untuk

panggung pertunjukan sesuai dengan pangsa pasar. Tarian istana bukan lagi sebagai sarana upacara saja atau sebagai satu institusi yang berfungsi tunggal, karena tari juga menjadi dimensi ganda.

Dengan terjadinya perubahan-perubahan yang ada di dalam Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan dihilangkannya mitos-mitos yang ada dalam Beksan Lawung Ageng maka tercipta pengembangan Beksan Lawung Ageng yang ditampilkan dalam pembukaan pameran manuskrip milik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam memperingati 30 tahun bertahta Sultan HB X.

Mitos dan makna filosofis dari Beksan Lawung Ageng dalam tarian ritual tidak direproduksi, kecuali sisi kepahlawanan dari Beksan Lawung Ageng sehingga penyingkapan makna Beksan Lawung Ageng yang ditampilkan dalam peringatan 30 tahun bertahta Sultan HB X tahun 2019 tergantung dari pemilik ide dan/atau koreografer serta ruang tari. Koreografer mengkompromikan pada pertemuan antara kehendak tarian dengan konteks acara, penonton dan ruangan.

Koreografer tidak bersikap pasif terhadap tradisi yang ada meski secara keseluruhan tarian tersebut tetap tidak terjadi perubahan gerak, tetapi koreografer bersikap kritis sehingga berani melakukan interpretasi baru atas Beksan Lawung Ageng. Koreografer tidak hanya mengambil esensi yang ada dalam Beksan Lawung Ageng tapi juga mengamplifikasi penyampaian esensinya dengan menambah jumlah penari Jajar menjadikan penampilan Beksan Lawung Ageng lebih megah, sehingga orang-orang ingin melihat penampilan Beksan Lawung Ageng.

Arah dan Kebijakan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perlindungan Pusaka Budaya di Era Sultan HB X

Sultan HB X naik tahta pada 7 Maret 1989, memberikan harapan yang positif bagi kehidupan seni terutama seni tradisi, dengan arah kepemimpinannya terdapat dalam simbol-simbol yang ada dalam *Bedhaya Sang Amurwabumi* yang mengandung ajaran-ajaran kepemimpinan di masa yang makin maju (Suharti, 1992).

Sultan HB X (dalam Pragota, & Kusumadewi, 2018) menyatakan bahwa masyarakat berubah, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat berubah dan manusianya juga berganti, dan Karaton Ngayogyakarta

Hadiningrat bukan subjek kaku yang kolot terhadap perubahan. Menurut Sultan HB X bahwa tradisi yang berusaha dipertahankan tidak boleh hanya mengendap menjadi seremoni belaka sebab nafas budaya mestinya mampu mewujudkan dalam setiap kebijakan dan Sultan mengemban tugas sebagai penjaga kebudayaan sekaligus pemimpin spiritual (Pragota, & Kusumadewi, 2018) dan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat kebudayaan tidak pernah berhenti untuk memproduksi maupun mereproduksi ilmu pengetahuan (Hayu, 2019).

Kebijakan Sultan HB X dalam hal kebudayaan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat juga tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan terhadap budaya lain, kemampuan mengolah budaya, kesadaran dialogis, kepribadian kuat, kesinambungan dan kesatuan budaya mandiri. Kasultanan Yogyakarta berperan dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang dilakukan melalui pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan termasuk adat istiadat dan seni yang dimiliki, dilakukan dan dikembangkan oleh Kasultanan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kasultanan.

Menurut Bandem (2003) masalah pembinaan dan pengembangan kebudayaan merupakan persoalan yang kompleks dan rumit sehingga kebudayaan perlu diolah dengan strategi holistik.

Kebijakan Sultan HB X dalam bidang seni tari dilakukan oleh *Kawedanan Hageng Panakawan (KHP) Kridha Mardawa Kraton* dengan langkah awal yang dilakukan dalam melaksanakan program adalah mengembalikan marwah keraton seperti asal mulanya.

Dalam rangka pelestarian dan promosi tarian keraton, khususnya Beksan Lawung Ageng, bahwa untuk menjadi warisan tak benda terdapat berbagai syarat diantaranya harus lestari atau berkelanjutan, sehingga tarian tersebut harus ditarikan secara rutin. Langkah yang telah dilakukan adalah secara rutin melatih Beksan Lawung Ageng

dan kemudian mempromosikannya kepada masyarakat. Supaya suatu tarian lestari maka harus memastikan bahwa masyarakat faham dan bisa mengapresiasi tarian tersebut.

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat berusaha mencari peminat kebudayaan istana dalam upaya membumikan kebudayaan istana di masyarakat, di antaranya sejak tahun 2015 aktif di dunia maya supaya untuk menjangkau kaum muda.

Sebuah karya seni eksklusif semakin *disengker* lama-lama akan ditinggalkan dan dari sisi pelaku seni sudah tidak bisa membawakan karya tersebut yang akibatnya pusaka tersebut hilang. Sehingga menurut hal ini bersifat dua belah pihak yaitu tergantung pasokan dan permintaan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dan perbedaan fungsi serta bentuk Beksan Lawung Ageng pada pernikahan GKR Hayu dengan KPH Notonegoro pada tahun 2013 dengan peringatan 30 tahun bertahta Sultan HB X tahun 2019. Selain itu diketahui faktor-faktor dan alasan-alasan atas perubahan fungsi dan perbedaan bentuk Beksan Lawung Ageng, yang mengungkapkan kebijakan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat di era Sultan HB X dalam perlindungan dan pengembangan pusaka tari. Perubahan-perubahan tersebut telah mendapat arahan dan persetujuan dari Sultan HB X karena Karaton mengikuti perkembangan jaman.

Perubahan fungsi terjadi pada peringatan 30 Tahun Bertahta Sultan HB X tahun 2019, menjadi tarian sekuler yang merupakan tontonan. Perubahan bentuk terutama karena jumlah penari, di mana jumlah penari dalam pernikahan agung tahun 2013 berjumlah 16 orang, sedangkan dalam peringatan 30 Tahun Bertahta Sultan HB X tahun 2019 dibawakan oleh 40 orang penari. Dalam Beksan Lawung Ageng yang ditampilkan dalam peringatan 30 Tahun Bertahta Sultan HB X tahun 2019, mitos kesuburan yang digunakan dalam perkawinan agung tahun 2013 dihilangkan, sehingga yang dimunculkan adalah segi fisiknya yaitu kepahlawanan (keprajuritan/*wireng*). Tetapi meskipun bersifat tontonan, kesakralan Beksan Lawung Ageng dalam peringatan 30 Tahun Bertahta Sultan HB X tahun 2019 tetap dipertahankan kesakralannya melalui nyekar

ke makam leluhur di Imogiri, wilujengan dan adanya sesaji (*sajen*).

Perbedaan pendapat terhadap perubahan Beksan Lawung Ageng dikarenakan faktor sosiologis misal yang melihat dari cara pandang ningrat yang tidak ingin terjadi perubahan, karena studi tentang tari dan musik Jawa hampir selalu dilakukan secara ahistoris yang biasanya menggambarkan aspek-aspek seni tradisional seperti tidak berubah (Lindsay, 1991). Dalam kenyataan, perubahan tari terjadi ketika diajarkan karena telah diinterpretasikan, dan suatu warisan tradisi tidak harus dipertahankan tanpa perubahan sehingga menjadi unsur yang hidup dalam masyarakat pendukungnya (Rohmat, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S.W. (2019), *Sejarah Agama Jawa Menelusuri Kejawaen sebagai Subkultur Agama Jawa*, Yogyakarta: Araska.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2007), *Etnosains Untuk Etnokoreologi Nusantara (Antropologi dan Khasanah Tari)*, dalam R.M. Pramutomo (Ed.), 2007, *Etnokoreologi Nusantara (Batasan Kajian, Sistematika dan Aplikasi Keilmuannya)*, 86-110, Surakarta: ISI Press.
- Ariyanto, M.D. (2008), Rudolf Bultmann: Demitologisasi dalam Perjanjian Baru, *SUHUF Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 20 (2), 175-192.
- Ayuningtyas, Dinda Putri., Sutiyono, S. 2018. Eksistensi Kesenian Barongan Setyo Budoyo di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, Vol. 16, No. 1, 138 – 146.
- Bandem, I.M. (2003), *Pembangunan Bangsa: Perspektif Manajemen Kebudayaan*, dalam A.M.H. Kusmayati (Ed.), *Kembang Setaman: Persembahan untuk sang Mahaguru*, 10-19, Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta.
- Djoharnurani, S. (1991), Beksan Lawung Kraton Yogyakarta, *Seni: Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni*, I (02), 89-101.
- Dwiyanto, D., Ronald, A., Suwito, Y.S., Suharti, T. & Purwodiningrat, K.R.T. (2010), *Ensiklopedi Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Endraswara, S. (2015), *Agama Jawa Ajaran Amalan dan Asal-usul Kejawaen*, Yogyakarta: Narasi.
- Hardiman, F.B. (2014, Februari), Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Gadamer, makalah disampaikan dalam *Kuliah Pertama Kelas Filsafat Seni*, Serambi Salihara, Jakarta.
- Hayu, G.K.R. (2019, Maret), Sambutan Ketua Panitia Simposium Internasional Budaya Jawa dan Naskah Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, pidato dalam *International Symposium on Javanese Studies and Manuscripts of Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat 2019*, Yogyakarta.
- Kawendrasusanta, R.M.K. (1981), *Tata Rias dan Busana Tari Gaya Yogyakarta*, dalam F. Wibowo (Ed.), *Tari Klasik gaya Yogyakarta*, 164-176, Yogyakarta: Dewan Kesenian Propinsi DIY.
- Kuswarsantyo, K.R.T.C. (2019, Maret), Beksan Lawung Ageng Karya Sri Sultan Hamengku Buwono I, makalah disampaikan dalam *International Symposium on Javanese Studies and Manuscripts of Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat 2019*, Yogyakarta.
- Lindsay, J. (1991), *Klasik, Kitsch, Kontemporer Sebuah Studi tentang Seni Pertunjukan Jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Martiara, R. (2003), *Pengaruh Timbal Balik antara Arena Pertunjukan dan Pertunjukan yang Dipersentasikan*, dalam A.M.H. Kusmayati (Ed.),

- Kembang Setaman: Persembahan untuk sang Mahaguru*, 169-185, Yogyakarta: ISI Yogyakarta.
- Pragota, A. & Kusumadewi, A. (Ed.), (11 April 2018), *Kisah Sultan HB X: Jalan Sukar Menuju Tahta Keraton*, diakses dari https://kumparan.com/@kumparan_news/kisah-sultan-hb-x-jalan-sukar-menuju-takhta-keraton.
- Pramayoza, D. (2013), *Strategi Membaca 'Pagelaran', Seorang Antropolog, dan Sebuah Mozaik Penelitian*, dalam Simatupang, L. & D. Pramayoza (2013), *Pergelaran, Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya*, Cetakan I, Yogyakarta: Jalasutra.
- Pramutomo, R.M. (2009), *Tari, Seremoni, dan Politik Kolonial I: "Pseudoabsolutisme" Pasca Pejanjian Giyanti 1755 dan Konteks Perkembangan Tari Jawa Gaya Yogyakarta*, Cetakan pertama, Surakarta: ISI Press.
- Rohmat, N. (2013), *Pewarisan Tari Topeng Gaya Dermayon: Studi Kasus Gaya Rasinah*, *Resital*, XIV (1), 33-40.
- Sedyawati, E. (1980), *Sejarah Tari Indonesia: Sebuah Rangka Permasalahan, Analisis Kebudayaan*, I (2), 27-34.
- Siswanto, J. (2017), *Horizon Hermeneutika*, Cetakan kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Slamet, (2018), *Metodologi Penelitian Tari*, Cetakan Pertama, Surakarta: ISI Press.
- Soedarsono, R.B. (1984), *Studi Komparatif Beksan Lawung Gaya Surakarta dan Gaya Yogyakarta*, Laporan Penelitian, ASTI Yogyakarta, Yogyakarta: Tidak diterbitkan.
- Soedarsono, R.M. (1997), *Wayang Wong: Drama Tari Ritual Kenegaraan di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soedjono, S. (1997), *Dari Ritual ke Sekuler: Proses De-Mythology dalam Karya Seni Pertunjukan*, *Seni: Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni*, Edisi Khusus, 322-334.
- Suharti, T. (1992), *Bedaya Sang Amurwabumi: Sebuah Bentuk Ekspresi Seni Budaya Tradisi dalam Era Budaya Baru*, *Seni: Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Seni*, II (03), 1-13.
- Suryobrongto, G.B.P.H. (1981), *Kawruh Joged-Mataram*, Yogyakarta: Dewan Ahli Yayasan Siswa Among Beksa Ngayogyakarta Hadiningrat.
- Sutiyono. (2013). *Poros Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (warisanbudaya.kemdikbud.go.id, 1 Januari 2010), *Beksan Lawung*, diakses dari <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=88>
- Widaryanto, F.X. & Sumardjo, J. (Ed.), (2002), *Merengkuh Sublimitas Ruang*, Cetakan Pertama, Bandung: STSI Press Bandung.